

■ Elite Politik Dalang Korupsi

JAKARTA, TRIBUN - Penyimpangan anggaran selama 7 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai Rp 103,19 triliun. Data ini dilansir Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam jumpa pers *Evaluasi 5-2 Tahun Pemerintahan SBY* di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (23/10).

Data yang dilansir Fitra tersebut diakui merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Dari temuan yang direkomendasi BPK ini, baru Rp 37,87 triliun yang



TRIBUN/DOK

” Mereka yang duduk di parlemen dan kementerian namun berasal dari parpol, dituntut menghidupi partai politiknya. ”

YUNA FARHAN

Sekjen Fitra

ditindaklanjuti,” papar Sekjen Fitra, Yuna Farhan.

Sementara itu, Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang melansir hasil surveinya dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta,

Minggu, mengungkapkan, sebanyak 55,5 persen masih percaya Presiden bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan

■ Bersambung ke Hal 7

50,4 persen merasa kecewa dan tidak percaya.

Siapa aktor utama di balik penyimpangan anggaran yang sedemikian besar, Rp 103 triliun? Fitra menduga, sebagian besar adalah elite politik, baik di parlemen maupun di kementerian.

"Karena mereka yang duduk di parlemen dan yang di kementerian namun berasal dari parpol tertentu memang dituntut untuk menghidupi partai politiknya dengan 'merampok' uang rakyat dari AP-BN," ujar Yuna.

Presiden SBY sendiri, seusia melantik 12 menteri dan 13 wakil menteri hasil perombakan kabinet di Istana Negara, Rabu (19/10), mengakui, korupsi oleh oknum pemerintah pusat dan daerah serta di parlemen masih terjadi.

"Uang negara dirampok oleh mereka yang tidak bertanggung jawab," kata SBY.

Jumlah duit rakyat yang disimpangkan sebesar Rp 103 triliun itu menjadi hal yang sangat memirisakan jika dibandingkan dengan anggaran untuk kegiatan pengentasan kemiskinan yang hanya Rp 86,1 triliun selama 2011. Anggaran pengentasan kemiskinan untuk jangka waktu lima tahun, 2010-2014, pun hanya sekitar 270 triliun.

Sementara jumlah utang pemerintah pada posisi 2011 sekitar Rp 1.807,5 triliun. Dengan utang sebanyak itu, rakyat Indonesia yang berjumlah hampir 238 juta jiwa pada sensus 2010, masing-masing menanggung Rp 7,6 juta.

Seandainya rakyat Indonesia patungan untuk membayar utang itu, maka diperlukan sekitar 7 bulan bagi tiap orang untuk dipotong seluruh pendapatannya (dengan asumsi pendapatan rata-rata penduduk Indonesia sekitar Rp 1,17 juta).

Lips Service
Pada bagian lain, Fitra menilai, arahan SBY kepada semua jajarannya untuk selalu berhemat dalam penggunaan anggaran, pada akhirnya hanya menjadi *lips service* belaka. "Kenyataannya, di lapangan kondisi pemborosan itu terus berlanjut," jelas Yuna.

Fitra mencontohkan, setiap tahun anggaran perjalanan dinas mengalami peningkatan. Malahan, peningkatan ini beru-

ngun pada penyimpangan-penyimpangan.

"Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009, nilai penyimpangan dari perjalanan dinas mencapai Rp 73,5 miliar," kata Yuna.

Penyimpangan belanja perjalanan dinas pada Semester I 2011 pun mengalami peningkatan menjadi Rp 89,5 miliar. Nilai tersebut berdasarkan hasil audit BPK di 44 kementerian/lembaga.

Selain itu, pemborosan yang terus dilakukan pemerintahan SBY, menurut Fitra, seperti fasilitas kendaraan untuk pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Untuk memenuhi kebutuhan itu saja diduga menghabiskan uang negara sampai Rp 278 miliar, untuk membeli mobil.

Rinciannya:

- 79 unit kendaraan pejabat negara (Toyota Crown Royal Saloon).

- 9 unit kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz S-600).

- 32 unit kendaraan kawal VVIP (Mercedes Benz 280 CDI).

- 2 unit kendaraan VVIP Kepresidenan (Mercedes Benz G-500).

- 8 unit kendaraan ajudan RI 2 dan RI 1 (Toyota Innova).

- 8 unit kendaraan ajudan RI 1 dan RI 2 (Toyota Avanza).

Ketimpangan juga terlihat ketika pemerintah menganggarkan belanja pegawai Rp 215,7 triliun untuk 4,7 juta pegawai, sementara anggaran kemiskinan 31 juta penduduk miskin empat kali lebih rendah dari belanja pegawai atau hanya Rp 50 triliun.

"Belanja pegawai senilai Rp 215,7 triliun merupakan belanja tertinggi pemerintah pusat mengalahkan dominasi belanja subsidi selama ini," katanya.

Catatan Fitra memperlihatkan adanya politik anggaran menguntungkan elit pemburu rente anggaran. "Biaya politik tinggi dan politik anggaran memicu elit politik untuk memburu rente anggaran," kata Yuna.

Dengan kenyataan ini, menurut Yuna, jelas sekali instruksi SBY itu tidak sesuai harapan. Fitra menilai Istana tidak mampu menjadi lokomotif penghematan anggaran.

Tidak seorang pun pihak Istana dapat dikonfirmasi me-

ngenai tuduhan Fitra. Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik Presiden, Daniel Sparingga, tidak bersedia memberi penjelasan. "Saya tidak mau berkomentar," ujarnya saat dikonfirmasi *Tribun*.

Lokalisir Korupsi

Terkait dengan paparan Fitra, dan pernyataan SBY sebelumnya mengenai "uang negara dirampok", anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir, dalam kesempatan terpisah menuding pemerintah melokalisir dugaan adanya korupsi.

"Akhir-akhir ini banyak uang negara yang 'dirampok', yang akhirnya justru kasusnya terlokalisir di satu orang. Kalau kasus Gayus Tambunan ya Gayus aja, Susno ya di Susno saja, *nggak* kemana-mana," ujarnya.

Nudirman menyatakan hal tersebut Nudirman dalam diskusi yang digelar Lembaga Penegakan Hukum & Strategi Nasional (LPHSN) bertema SBY: *Uang Negara Dirampok. Kenapa Tidak Dibius Secara Tuntas?* di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu.

"Jadi, sekarang ada model baru, melokalisir kasus korupsi. Kalau mau merembet kepada orang atau perusahaan lain, maka sudah diarahkan," kata Nudirman.

Nudirman mengatakan, bila kasus korupsi ditangani serius maka masyarakat akan mengapresiasi kinerja SBY. Pasalnya, uang negara mencapai triliunan rupiah dapat diselamatkan.

"Kemauan dari SBY untuk memberantas 'perampok' negara ini saya yakin akan disambut dengan baik oleh rakyat. Pernyataan SBY tentang pemberantasan perampok uang negara akan diapresiasi. Tapi, kalau sebenarnya beliau hanya keceplosan, saya *enggak* tahu," kata politisi Golkar ini.

50,4% Kecewa

Sementara itu, Jaringan Suara Indonesia (JSI) melansir hasil survei, sekitar separuh warga Indonesia tidak percaya SBY bisa menyelesaikan masalah.

Masalah hukum pancung Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, kasus dugaan korupsi Wisma Atlet dan kasus Bank Century menjadi alasan warga mengenai ketidakpercayaan ini.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif JSI, Widdi Aswandi, dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu.

"Sebanyak 55,5 persen masih percaya Presiden bisa menyelesaikan masalahnya. Sedangkan 50,4 persen merasa kecewa dan tidak percaya," ujar Widdi.

Survei dilakukan pada 10 sampai 15 Oktober 2011, dengan metode pengambilan sampel *multistage random sampling* di 33 provinsi di Indonesia.

Didapatkan 1.200 responden dengan metode pengumpulan data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner, sementara margin of error 2,9 persen.

Kasus-kasus yang menyita publik seperti hukum pancung TKI dan Wisma Atlet menjadi penyebab menurunnya angka kepuasan. Sebanyak 73,1 persen responden menganggap SBY-Boediono tidak bisa menyelesaikan kasus Century.

Sedangkan untuk tingkat kepuasan kinerja Presiden SBY-Boediono, JSI membandingkannya dengan data survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu di mana tingkat kepuasan terhadap kinerja SBY 62 persen dan terhadap Boediono, 49 persen.

"Sejak Oktober 2010 hingga Oktober 2011 ini, kinerja SBY turun dari 62 persen menjadi 53,2 persen. Sedangkan Boediono, dari 49 persen menjadi 44,8 persen," jelasnya.

Menanggapi hasil survei tersebut, Partai Demokrat menyatakan tidak khawatir.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengapresiasi dan menghargai survei yang telah dilakukan JSI. Hasil survei tersebut menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah dan Demokrat, sebagai bahan untuk mengantisipasi dan mengevaluasi kebijakan ke depan.

"Terkait survei JSI, tingkat kepuasan dari segi kinerja SBY memang trennya menurun. Januari 2010 70 persen, Oktober 2010 62 persen, dan Oktober 2011 sesuai survei JSI sekitar 53,2 persen," tutur Saan.

Saan menegaskan, hasil survei tersebut tidak menunjukkan dalam batas yang mengkhawatirkan, sebab masih dalam batas tingkat kepuasan. (*tribunnews/fer/edf*)